

## **Optimalisasi Pengelolaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Kelurahan Lappa Sinjai Utara**

**Fitrawati<sup>1</sup>, Mardiana<sup>2</sup>**

<sup>1,2</sup>Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Sinjai

E-mail: [Fitrawatiab67@gmail.com](mailto:Fitrawatiab67@gmail.com)

**Abstrak:** Tujuan penelitian yang di maksudkan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Optimalisasi Pengelolaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara dan untuk mengetahui apa saja faktor Penghambat yang dihadapi Optimalisasi Pengelolaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) Pada Dinas Sosial Di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara. Metode penelitian ini adalah Kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Selanjutnya untuk menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, Lalu penarikan kesimpulan, penelitian ini menggunakan informan sebagai pelaku yang di anggap memahami objek penelitian ini. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa optimalisasi pengelolaan bantuan program keluarga harapan pada dinas sosial di kelurahan Lappa sudah baik dilihat dari optimalisasian masyarakat dan teknik. Di sini pengelolaan sebagai perwakilan masyarakat dalam hal ketika terjadi perubahan status anggota keluarga, menyampaikan informasi maupun melakukan Verifikasi terhadap data keluarga penerima bantuan PKH, sedangkan dalam pengelola bantuan (PKH) sebab kurangnya pemahaman keluarga penerima bantuan PKH (Program Keluarga Harapan).

**Kata kunci;** Optimalisasi, Pengelolaan, PKH

**Abstract:** The research objective intended in this study was to find out the Optimization of the Management of the Family Hope Program Assistance (PKH) at the Social Service in Lappa Village, North Sinjai District and to find out what are the inhibiting factors faced by Optimizing the Management of the Family Hope Program Assistance (PKH) in Social Service in Lappa Village, North Sinjai District. This research method is descriptive qualitative with data collection techniques of observation, interviews, and documentation. The type of data used in this study uses primary data and secondary data. Furthermore, to analyze the data using data reduction techniques, data presentation, then drawing conclusions, this study uses informants as actors who are considered to understand the object of this research. The results of this study indicate that the optimization of the management of the Family Hope Program assistance at social services in the Lappa sub-district has been good in terms of community optimization and technique. Here the management as a representative of the community in the case when there is a change in the status of family members, conveys information or verifies data on families receiving PKH assistance, while in the management of assistance (PKH) it is due to a lack of understanding of families receiving PKH assistance (Hopeful Family Program).

**Keywords:** Optimization, Management, PKH

### **Article History:**

Received; 10-06-2023; Revised; 02-07-2023; Accepted; 08-08-2023

## **PENDAHULUAN**

Dalam mencapai kesejahteraan sosial bagi masyarakat dan sebagai bentuk pengendalian penanggulangan kemiskinan, pemerintah Indonesia meluncurkan Program Keluarga Harapan (PKH) sebagai langkah progresif dalam upaya pengentasan kemiskinan. Menurut Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

yang selanjutnya disingkat PKH adalah program pemberian bantuan sosial bersyarat kepada keluarga atau seseorang miskin dan rentan yang terdaftar dalam data terpadu program penanganan fakir miskin, diolah oleh Pusat Data dan Informasi Kesejahteraan Sosial dan ditetapkan sebagai keluarga penerima PKH.

Melalui Program Keluarga Harapan diharapkan dapat menjadi stimulus bagi masyarakat yang membutuhkan. Terutama dalam pemenuhan kebutuhan primer sebagai penunjang kehidupan. Program yang sudah dimulai sejak tahun 2007 ini memberikan dampak yang besar bagi masyarakat penerima manfaat. Salah satu dari Program Keluarga Harapan berfokus kepada penanganan kepada orang lanjut usia. Data kemiskinan Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan, menunjukkan pada tahun 2021 terdapat 21,690 penduduk miskin ([sinjaikab.bps.go.id](http://sinjaikab.bps.go.id)). Maka dari itu perlu penanganan yang maksimal dari pihak terkait dalam upaya pengentasan kemiskinan, utamanya yang ada di Kelurahan Lappa.

Penetapan dalam pemilihan keluarga yang akan menjadi peserta PKH ini ditetapkan serta dilakukan secara terpusat oleh Direktur Jaminan Sosial Keluarga Harapan Kementerian Sosial RI melalui data kemiskinan tiap-tiap daerah. Melalui data tersebut kemudian Kementerian Sosial membuatkan undangan untuk diberikan kepada keluarga calon peserta melalui Koordinator PKH Kemensos di Kabupaten/Kota. Undangan yang masih dalam bentuk file tersebut kemudian oleh Administrator PKH undangan dicetak dan diberikan kepada masing-masing pendamping PKH di tingkat Kecamatan. Setelah itu pendamping PKH melaporkan dan memberikan undangan ke Kecamatan dan kemudian melalui Kecamatan, undangan diserahkan kepada Perangkat Desa. Setelah undangan sampai di Desa, perangkat Desa bersama Pendamping PKH tingkat Desa akan melakukan validasi data. Validasi data yang dilakukan oleh pendamping desa bersama perangkat desa berupa kegiatan meninjau langsung keadaan keluarga yang termasuk dalam data calon peserta PKH. Hal ini memiliki tujuan dalam memastikan apakah calon penerima program yang terdaftar tersebut miskin. Untuk pelaksanaan dilapangan, Program Keluarga Harapan di tingkat Kecamatan dilaksanakan oleh tim tingkat Kecamatan yang disebut sebagai pendamping PKH yang memiliki tugas dalam validasi data serta penyerahan program bantuan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Dari penjelasan di atas, penulis tertarik membahas mengenai implementasi dari program Kartu Keluarga Sejahtera. Oleh karena itu penulis ingin mengambil judul *“Optimalisasi Pengelolaan Bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) pada Dinas Sosial di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara”*

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian Deskriptif dengan pendekatan Kualitatif. Penelitian ini direncanakan di Kantor Dinas Sosial Kabupaten Sinjai. Informan dalam penelitian ini adalah Kepala Dinas Sosial Kabupaten Sinjai, Pendamping PKH Kelurahan Lappa, Lurah Lappa, Masyarakat Penerima Manfaat Program Kartu Harapan, dan Masyarakat yang tidak terdaftar dalam Program Kartu Harapan. Teknik pengumpulan data observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun jenis data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data primer dan data sekunder. Selanjutnya untuk menganalisis data menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, Lalu penarikan kesimpulan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Optimalisasi Pengelolaan Bantuan Program keluarga Harapan PKH Dinas Pada Dinas Sosial di Kelurahan Lappa Kecamatan Sinjai Utara**

Program Keluarga Harapan (PKH) merupakan program penanggulangan kemiskinan yang termasuk dalam program perlindungan sosial (Perlinsos). Bagi masyarakat yang sedang



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

hamil, menyusui, memiliki anak balita, memiliki anak usia SD/SMP atau usia 15-18 tahun yang belum menyelesaikan pendidikan dasar, maka akan mendapatkan bantuan perlindungan sosial melalui pemberian uang non tunai. Berdasarkan distribusi hasil Wawancara selama penelitian berlangsung tentang PKH adalah salah satu program bantuan yang di berikan kepada Keluarga Penerima Manfaat (KPM). PKH adalah program bantuan tunai untuk keluarga sangat miskin yang memenuhi salah satu dari tiga kriteria penerima.

## Tujuan

Tujuan dari optimalisasi dapat berbentuk maksimum atau minimum. Maksimum digunakan apabila tujuan pengeoptimalisasian berhubungan dengan keuntungan, pemerintahan, dan sejenisnya. dari Program Keluarga Harapan di antaranya untuk memutus rantai kemiskinan dan memperbaiki kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) supaya menjadi lebih baik. Hal itu patut direalisasikan supaya dapat mendukung peningkatan kesejahteraan warga dan generasi berikutnya. Semoga dengan adanya program ini generasi berikutnya dapat keluar dari perangkap zona kemiskinan.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa Program Keluarga Harapan (PKH) untuk meningkatkan taraf kehidupan keluarga penerima manfaat pendapatan layanan kesehatan, pendidikan penerima manfaat kendala yang bisa mencul dikarenakan tidak sesuai data keluarga penerima manfaat dengan yang ada di lapangan, kemudian yang sudah terlampaui meninggal datanya harus di perbaiki.

**Tabel 4.2 Penerima Manfaat PKH Di Lingkungan Lappa**

| No. | Lungkungan           | Jumlah   |
|-----|----------------------|----------|
| 1.  | Lingkungan Tappe'e   | 59 orang |
| 2.  | Lingkungan Lappae    | 35 orang |
| 3.  | Lingkungan Talibungi | 30 orang |
| 4.  | Lingkungan Lengkong  | 31 orang |
| 5.  | Lingkungan Baru      | 29 orang |
| 6.  | Lingkungan Larea-rea | 27 orang |
| 7.  | Lingkungan Kokoe     | 43 orang |

## Alternatif Keputusan

Alternatif keputusan adalah mengambil keputusan yang terkait dengan masalah seleksi penerima bantuan PKH untuk masyarakat miskin sehingga dapat menentukan penerimanya secara tepat sasaran dalam kalangan masyarakat miskin.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kepala dinas sosial bahwa program ini harus di manfaatkan oleh masyarakat sebaiknya-baiknya dan digunakan semestinya bawah dalam memecahkan kemiskinan di masyarakat sulit untuk untuk di lakukan karena tingginya angka kemiskinan namum dalam meringankan beban masyarakat kurang mampu dala memenuhi kebutuhanya dan memeng benar-benar layak untuk mendapatkan bantuan ini. Penelitian juga menunjukkan bahwa respon masyarakat bantuan ini merasa puas dan terbantuan dengan adanya PKH ini, karna bantuan ini bisa membantu pendidikan dan kesehatan. dan anak-anak dari penerima bantuan PKH ini juga bisa mendapatkan bantuan sekolah mereka masing-masing mereka tidak terbebani lagi dengan biaya-biaya sekolah dan bisa membeli perlatan sekolah dengan adanya bantuan itu orang tuanya tidak pusing lagi. Hal tersebut menunjukkan bahwa dalam hal ketetapan menerima bantuan sudah tepat dan sesuai sasaran yang di inginkan dan penentuan juga melalui tahap selepsi sama bahwa ketepatan bantuan ini memang sudah tepat dari mereka yang tidak menerima bantuan termasuk dalam golongan masyarakat miskin.



## Sumber Daya

Sumber daya adalah pelaksanaa PKH yang menuntut adanya sumber daya yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik terdiri dari sumber daya manusia, sumber daya finansial dan waktu. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ketetapan sasaran ini sudah tepat karena setelah ada nama-nama peserta keluar dari pusat sebagai parah calon penerima bantuan maka pendamping turung langsung kelapangan untuk memastikan lagi apakah benar warga atau masyarakat tersebut benar layak sebagai sebagai penerima bantuan. Pendamping melakukan seleksi berkas tinjauan rumah dan sebagainya. Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa untuk melihat tingkat keefektifan dari program keluarga masyarakat menjadi sebagai dasar pengetahuan efektifitas program masyarakat PKH dapat dilihat adanya sesuai antara komsep dengan fakta di lapangan sehingga tujuan dari program ini berjalan dengan baik.

## Faktor Pendukung dan Penghambat Pengelolaan Bantuan Program Keluarga Harapan

### Faktor Pendukung

Untuk faktor pendukung pelaksanaan PKH di kelurahan lappa PKH merupakan upaya pemerintah dalam menentukan program kebijakan sosial penanggulangan kemiskinan di indonesia. Program ini didesain untuk meningkatkan kemampuan rumah tangga sangat Miskin dalam mengakses kebutuhan dasar di bidang pendidikan dan kesehatan serta untuk kesehatan ibu hamil, nifas, dan menyusui. Hadirnya PK(H merupakan upaya jangka panjang yang dilakukan oleh pemerintah untuk meningkatkan pembangunan masyarakat di indonesia. Upaya ini merupakan salah satu langkah kebijakan yang ditempuh oleh pemerintah sebagai persiapan untuk menghadapi *millenium Development Goals* (MGsS) 2015

### Faktor Penghambat

Pertama adanya masalah satu RW di kelurahan Lappa yang sebagai besar penduduknya bekerja di sektor informal. Kalangan tersebut memiliki persepsi bahwa upaya untuk pemenuhan kebutuhan di bidang pendidikan dan kesehatan melalui PKH tidak akan memberikan dampak yang positif bagi peningkatan kesejahteraan hidup. Sehingga hal ini menjadi sebuah kendala tersendiri dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Lappa

Kedua, indikasi adanya ketidaksesuaian pelaksanaan dalam penyaluran dana bantuan sudah terlihat pada saat pencairan pertama berlangsung. Dana bantuan yang seharusnya cair pada bulan April atau Mei menjadi mundur hingga bulan Juli 2014. Keadaan tersebut menjadikan situasi yang tidak kondusif dalam pelaksanaan PKH di Kelurahan Lappa. Pihak informan menerangkan jika pada saat itu peserta PKH telah berharap jika dana bantuan dapat diterima sesuai dengan prosedur, namun yang terjadi adalah harapan mereka tidak sesuai dengan realitas.

Ketiga, pemberitahuan informasi tentang turunnya dana bantuan yang dilakukan oleh pihak kantor pos kepada pihak pendamping seringkali tidak bisa diprediksi. Masalah timbul ketika target waktu yang diberikan oleh pihak kantor pos seringkali tidak mampu untuk memfasilitasi pihak pendamping dalam mempersiapkan kebutuhan yang diperlukan. Informan menerangkan jika setidaknya perlu waktu satu minggu untuk menyampaikan informasi tersebut hingga seluruh peserta PKH mengetahuinya. Sementara, pihak kantor pos seringkali memberikan tenggat waktu yang kurang dari satu minggu.

Keempat, di bidang pendidikan terdapat faktor yang menjadi penghambat pelaksanaan PKH di Kelurahan Tanjungrejo. Faktor penghambat tersebut adalah tidak terdapatnya fasilitas bangunan Sekolah Menengah Pertama (SMP) yang dapat mendukung proses kegiatan belajar



peserta PKH. Para peserta PKH terpaksa harus menyekolahkan anak mereka ke sekolah yang berada di luar wilayah Kelurahan Lappa.

Sementara di bidang kesehatan, tidak terdapatnya fasilitas kesehatan seperti puskesmas dan rumah sakit membuat pelaksanaan PKH di bidang kesehatan menjadi terhambat. Jika fasilitas kesehatan yang berada di Kelurahan Lappa tidak dapat memenuhi kebutuhan para peserta PKH, maka peserta PKH diharuskan untuk mengakses fasilitas tersebut di luar wilayah Kelurahan Lappa.

Kelima, dalam pelaksanaan program kebijakan sosial seperti PKH, seringkali proses pelaksanaan mengalami hambatan dalam hal aktivitas mengelola dana bantuan yang diterima oleh peserta (penduduk miskin). Pihak pendamping terkadang tidak mengetahui apakah dana bantuan tersebut digunakan secara menyeluruh untuk membiayai kebutuhan yang menjadi fokus PKH, yakni pemenuhan kebutuhan di bidang pendidikan dan kesehatan.

## KESIMPULAN

Optimalisasi pengelolaan bantuan Program Keluarga Harapan (PKH) di Kelurahan Lappa sudah baik dalam penerima bantuan PKH penerima manfaat seperti sebagai perwakilan masyarakat ketika adanya perubahan status perubahan anggota keluarga maupun mencapainya informasi untuk pengoptimalisasian pengelolaan bantuan PKH di Kelurahan lappa telah melakukan verifikasi data keluarga penerima bantuan PKH untuk menentukan layak tidaknya keluarga tersebut mendapatkan bantuan PKH. Selanjutnya untuk pengoptimalisasian pengelolaan penerima bantuan kurangnya pengetahuan keluarga penerima bantuan PKH Program keluarga Harapan dan apa saja kewajibannya,

Adanya penerima bantuan PKH yang belum melapor ke pendamping terkait perubahan status perubahan anggota keluarganya, adanya keluarga penerima bantuan yang tidak memiliki usaha. Selain itu terdapat faktor lain yaitu terkait data penerima bantuan PKH yang tidak valid dikarenakan ketidaksesuaian data dengan data yang ada di lapangan sehingga nama penerima bantuan PKH tidak terdata lagi dikarenakan pengaruh sistem dan hal tersebut dapat mengakibatkan bantuan keluarga penerima bantuan PKH tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. 2017. *Dasar-dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Agustino, Leo. 2016. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung. Alfabeta.
- Ali, M.A., 2014. *Analisis Optimalisasi Pelayanan Konsumen Berdasarkan Teori Antrian pada Kaltimgps.Com di Samarinda*, Ejournal Ilmu Administrasi Bisnis.
- Atmosudirjo, Prajudi. 1982. *Administrasi dan Manajemen Umum*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Ayuningtyas, Dumilah. 2014. *Kebijakan Kesehatan Prinsip dan Praktik*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Badudu dan Zain. (1996). *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pustaka Sinar Harapan.
- Congge, Umar, 2020. *Pedoman Penulisan proposal dan Skripsi*. Penerbit UMSi Press Sinjai : Universitas Muhammadiyah Sinjai, Edisi IV.
- Depdiknas. 2001. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta ; Balai Pustaka
- Dunn, William N. 2003. *Pengantar Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta, Gajah Mada University
- Ealau dan Pewitt, 1973. *Kebijakan Publik*. Jakarta : Handal Niaga Pustaka
- Harsoyo. 1977. *Manajemen Kinerja*. Persada, Jakarta.
- Hasan. 2002. *Pokok-Pokok Materi Metodologi Penelitian dan Aplikasinya*. Penerbit Ghalia Indonesia : Jakarta
- Iyoto, Sandu dan Ali Sodik. 2015. *Dasar Metodologi Penelitian*. Yogyakarta : Literasi Media Publishing
- Kosasih. 1998, *Managemen Pemerintahan dalam Sistem dan Struktur Administrasi Negara*



This work is licensed under a  
Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

- Baru*, Bandung : Idola Remaja dan Doa Ibu.
- Masyhuri dan M. Zainuddin. (2008). *Metodologi Penelitian Sosial dan Ekonomi, Teori dan Aplikasi*. Penerbit Alfabeta. Bandung.
- Nugroho. 2003. *Kebijakan Publik Formulasi, Implementasi dan Evaluasi*. Jakarta: PT. Elex Media Komputindo.
- Pasolong, Harbani. 2016. *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta
- Poerwadarminta. 1997. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Jakarta: PN Balai Pustaka.
- Soehartono.1995. *Metode Penelitian Sosial: Suatu Teknik Penelitian Bidang Kesejahteraan Sosial dan Ilmu Sosial Lainnya*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya
- Suharto, Edi. 2005. *Membangun masyarakat memberdayakan rakyat*, bandung : Refika Aditama.
- Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Program Keluarga Harapan

